

# Briefing Subsidi Energi Indonesia



GSI Global Subsidies Initiative

iisd International Institute for Sustainable Development Institut international du développement durable

JUNI  
2014

SEBAGAI BAGIAN DARI AKTIVITAS KAMI DI SEKTOR KEBIJAKAN ENERGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA, GLOBAL SUBSIDIES INITIATIVE (GSI) DARI INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (IISD) MEMUBLIKASIKAN SEBUAH TERBITAN BERKALA TENTANG ISU-ISU TERKAIT SUBSIDI ENERGI. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HARAP HUBUNGI LUCKY LONTOH DI ALAMAT EMAIL [LUCKY.LONTOH@IISD.ORG](mailto:LUCKY.LONTOH@IISD.ORG) DAN CHRISTOPHER BEATON DI ALAMAT [CBEATON@IISD.ORG](mailto:CBEATON@IISD.ORG).

## **Rencana Reformasi Subsidi Bahan Bakar Calon-calon Presiden Indonesia**

Pada 9 Juli mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden yang mempertemukan dua pasangan capres dan cawapres: Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Meskipun kedua pasangan calon memahami bahwa Indonesia harus mereformasi kebijakannya (Detik.com, 2014a), masing-masing pasangan memiliki rencana yang berbeda tentang cara mereformasi pola subsidi energi dalam lima tahun ke depan.

Joko Widodo secara terbuka menyuarakan rencananya untuk menghapuskan subsidi bahan bakar secara bertahap dalam jangka waktu 4 atau lima tahun, dengan kenaikan harga berkala yang besarnya sama setiap tahunnya hingga mencapai harga keekonomian (Detik, 2014b). Pandangan umum Widodo terkait subsidi bahan bakar konsisten dengan pernyataannya selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta dalam satu setengah tahun terakhir, meskipun partainya, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan), selama ini dikenal konsisten menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar.

Pasangan Widodo, Jusuf Kalla, yang juga mantan Wakil Presiden, juga diketahui sejak lama memiliki sikap tegas mendukung penyesuaian harga bahan bakar. Pandangan Kalla terhadap perubahan ini terutama dipengaruhi oleh pandangannya mengenai ketidakadilan dalam skema pendistribusian subsidi bahan bakar Indonesia. Kalla menekankan kembali pandangannya bahwa subsidi apapun harus memiliki target yang jelas dan hanya boleh diarahkan kepada yang membutuhkannya (Bisnis.com, 2014a). Kalla dikenal figur penting dalam memimpin skema pengurangan subsidi selama menjabat sebagai wakil presiden.

Widodo dan Kalla memperkirakan adanya pengurangan subsidi energi sebesar Rp. 60 triliun (US\$ 5,4 miliar)<sup>1</sup> dan pengurangan harga energi sebesar 20 persen melalui skema diversifikasi yang mendukung pengembangan infrastruktur gas (Bisnis.com, 2014b). Mereka juga menekankan pentingnya meningkatkan produksi energi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri (Viva, 2014a)

Sebaliknya, Subianto Rajasa menunjukkan kecenderungan pada kebijakan perubahan harga yang lebih terbatas, yang didasari analisa bahwa masalah utama dari subsidi adalah kelemahan dalam mencapai sasaran, sehingga subsidi dapat dinikmati oleh pihak yang tidak diinginkan, atau kelompok kaya, dan tidak terarah ke kelompok yang

1. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembicaraan terkait mata uang didasarkan pada nilai tukar 0,00009 US\$ per 1 rupiah.





# Briefing

## Subsidi Energi

membutuhkan. Drajad Wibowo, pakar ekonomi dari tim Subianto dan Rajasa, menyatakan bahwa subsidi akan tetap dipertahankan, namun hanya untuk kelompok miskin (Detik.com, 2014I). Fadli Zon, wakil ketua umum dan salah satu pendiri Partai Gerindra, menambahkan mengikuti harga pasar mungkin terlalu sulit untuk Indonesia karena alasan ekonomi maupun karena batasan yang ditetapkan oleh konstitusi negara (Portal KBR, 2014).

Subianto dan Rajasa telah menyampaikan dokumen visi-misi kepada Komisi Pemilihan Umum yang isinya menegaskan keinginan untuk mengembalikan tata kelola energi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>2</sup> (Viva, 2014a). Salah satu cara untuk menafsirkan ide ini dapat dilakukan dengan merujuk pada Manifesto Partai Gerindra (partai yang dibentuk dan dipimpin oleh Subianto). Dalam dokumen sepanjang 50 halaman itu, Gerindra menyampaikan kritik keras terhadap liberalisasi, praktik kapitalis, dan pengaruh negatif dari kepentingan asing yang telah mengganggu arah pembangunan ekonomi nasional dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia (Gerindra, n.d., p. 14-20).

Rajasa adalah tokoh penting dalam memimpin kebijakan ekonomi dalam fase kedua masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sangat berpengaruh dalam memimpin pelaksanaan kebijakan kenaikan harga bahan bakar pada Juni 2013 (Detik, 2013). Rajasa adalah Menteri Perhubungan dari 2004-2009, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dari 2009 hingga pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada 2014.

Pernyataan tertulis visi-misi para pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia dapat dibaca pada tautan di bawah ini:

1. Prabowo Subianto - Hatta Rajasa: [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_prabowo-Hatta.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_prabowo-Hatta.pdf)
2. Joko Widodo - Jusuf Kalla: [http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_Jokowi-JK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf)

*Catatan: Laporan ini dibuat berdasarkan pernyataan politik resmi dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia hingga Juni 2014. Posisi politik antar kelompok politik di Indonesia dapat berubah sewaktu-waktu selama berlangsungnya proses pemilihan presiden dan perubahan konstelasi antar kelompok politik juga dapat mempengaruhi posisi partai-partai atau kandidat dalam banyak isu, termasuk isu subsidi bahan bakar minyak.*

## Over Kuota Subsidi Bahan Bakar, Revisi APBN

Pemerintah Indonesia telah mengusulkan revisi APBN untuk tahun fiskal 2013 yang mencakup penyesuaian subsidi bahan bakar dari Rp. 210,7 triliun menjadi Rp. 285 triliun (dari US\$ 19,0 miliar menjadi US\$ 25,7 miliar) dan subsidi listrik dari Rp. 71,4 triliun menjadi Rp. 107,1 triliun (US\$ 6,4 miliar menjadi US\$ 9,6 miliar). Alasan

2. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.; (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.





## Briefing

### Subsidi Energi

utama di balik usulan tersebut adalah tekanan terus-menerus terhadap rupiah sejak tahun lalu. Pembahasan usulan tersebut di DPR dimulai sejak pertengahan Mei 2014 dan hasilnya diperkirakan akan keluar pada Juni 2014 ini. Dalam pembahasan-pembahasan tersebut, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Gubernur Bank Indonesia (Detik.com, 2014c).

Kenaikan yang diusulkan dalam subsidi bahan bakar lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan Menteri Keuangan, Chatib Basri, yang telah menyatakan bahwa penyesuaian subsidi bahan bakar akan berkisar dari Rp. 20,3 triliun hingga Rp. 35 triliun (dari US\$ 1,8 miliar menjadi US\$ 3,2 miliar) (Kementerian Keuangan, 2014, Detik.com, 2014d). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada suatu faktor yang telah disesuaikan atau ditambahkan ke dalam perhitungan pemerintah. Faktor-faktor yang paling berpengaruh yang menentukan pengeluaran subsidi bahan bakar pada 2014 sejauh ini adalah volume konsumsi, tingkat produksi minyak dan nilai tukar.

Terkait dengan volume konsumsi, PT Pertamina, BUMN yang bertanggung jawab mendistribusikan bahan bakar bersubsidi, menyatakan telah mendistribusikan 14,99 juta kiloliter bahan bakar pada 30 April, yang setara dengan 31,7 persen kuota subsidi tahunan. Sementara distribusi Premium (bersubsidi) masih dalam perkiraan, yaitu sebesar 9,5 juta kiloliter atau 29,4 persen kuota, distribusi Solar (bersubsidi) yang sebesar 5,15 juta kiloliter atau 36,42 persen kuota sudah melampaui perkiraan (Berita Daerah, 2014).

Produksi minyak masih di bawah target karena penundaan produksi dari sejumlah kontraktor minyak. Menteri ESDM, Jero Wacik, menjelaskan bahwa produksi minyak dan gas akan mencapai 804 ribu barel per hari. Ini masih di bawah asumsi awal APBN 2014, yang menetapkan produksi minyak sebesar 870 ribu barel per hari. Dengan menurunnya produksi minyak domestik, Indonesia dipaksa menggunakan lebih banyak minyak impor untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, dan ini akhirnya mempengaruhi pengeluaran. Jero Wacik menambahkan bahwa ia telah meminta kontraktor minyak untuk mengoptimalkan output mereka agar dapat memenuhi target revisi sebesar 818 ribu barel per hari (Okezone, 2014a).

Nilai rupiah telah berada di bawah asumsi APBN selama beberapa bulan, dan mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan perhitungannya untuk mencerminkan nilai tukar saat ini. APBN 2014 mengasumsikan rupiah akan berada pada posisi Rp. 10.500 per US\$ 1, namun nilai tukar sesungguhnya terus berada di atas asumsi tersebut sejak akhir Agustus 2013 (Bank Indonesia, n.d.).

## Upaya Efisiensi untuk Menyikapi Kenaikan Harga

Menteri ESDM, Jero Wacik, menepis ide bahwa penyesuaian harga bahan bakar akan dilakukan dalam revisi APBN, mengingat masa jabatan kabinet yang hanya akan berlangsung hingga Oktober (Antara, 2014). Ia menambahkan bahwa pemerintah mencoba untuk mencari solusi yang akan mengurangi konsumsi bahan bakar yang semakin meningkat. Usulan yang baru-baru ini dimunculkan adalah menghentikan pembelian bahan bakar bersubsidi pada setiap akhir pekan (Okezone, 2014b). Meskipun kenaikan harga bahan bakar tidak mungkin terjadi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dilaporkan telah mempersiapkan berbagai skema, yang salah satunya adalah rekomendasi untuk meningkatkan harga energi (Inilah.com, 2014a).





## Briefing

### Subsidi Energi

Sebelumnya pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol konsumsi bahan bakar, termasuk melarang kendaraan pemerintah membeli bahan bakar bersubsidi serta rencana untuk memasang alat penjejak (RFID) yang dapat mengatur kuantitas bahan bakar yang dibeli oleh setiap kendaraan. Kedua program tersebut dikritik keras. Program pertama dikritik karena tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi bahan bakar, sementara program kedua dikritik karena kemajuannya yang lamban. Dari Juli 2013 hingga Mei 2014, misalnya, instrumen RFID telah dipasang di 331.000 kendaraan di Jakarta. Ini mencakup 7,3 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 4,5 juta kendaraan (Detik, 2014e).

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, mempertanyakan manuver baru pemerintah yang membatasi distribusi bahan bakar pada akhir pekan. Nainggolan menyatakan bahwa cara paling efektif untuk memecahkan masalah subsidi bahan bakar adalah dengan meningkatkan harga bahan bakar (Liputan6, 2014a).

Isu mendesak lainnya di balik keputusan ini adalah meningkatnya ketegangan politik dalam Pemilu 2014. Kepala Ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan, menyatakan bahwa ide meningkatkan harga bahan bakar sulit untuk diterapkan karena jadwal Pemilu serta akhir bulan suci Ramadhan (Detik, 2014f). Andin Hadiyanto, Kepala Interim BKF, menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar idealnya harus terjadi pada saat inflasi rendah agar dapat memitigasi dampak inflasi yang akan ditimbulkannya. Pemerintah telah disarankan agar tidak terburu-buru menaikkan harga di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil serta tingkat inflasi yang biasa terjadi pada tahun Pemilu dan bulan suci Ramadhan (RMOL Sumsel, 2014).

## Low Cost Green Car (LCGC): Solusi atau Masalah Baru?

Kontroversi terkait inisiatif Indonesia pada 2013 lalu untuk mendukung produksi dan penjualan mobil kecil dan berbahan bakar efisien, yang dikenal dengan nama low cost green car (LCGC) (IISD, 2013), semakin panas ketika mulai dikritik secara terbuka oleh para pejabat tinggi pada Maret 2014 lalu.

Kebijakan LCGC diperkenalkan sebagai cara untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional di Indonesia. Namun debat selama ini berfokus pada jenis bahan bakar apa yang boleh digunakan LCGC. Pemerintah sendiri belum mengeluarkan kebijakan panduan apapun mengenai hal ini.

Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kebijakan ini. Ia mengatakan bahwa LCGC seharusnya hanya mengonsumsi bahan bakar non-subsidi (Tempo, 2014f). Chatib Basri mengirim surat kepada Kementerian Industri yang bertanggung jawab atas kebijakan LCGC yang mempertanyakan kebijakan pemberian insentif fiskal terhadap LCGC yang mengonsumsi bahan bakar bersubsidi. Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan bahwa kementriannya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kebijakan tersebut. Namun ia menambahkan bahwa belum ada kebijakan untuk memastikan LCGC diperlakukan secara berbeda dari kendaraan lainnya (Medan Bisnis, 2014).

Menanggapi kekhawatiran Kementerian Keuangan tersebut, Kementerian Industri berjanji akan mengevaluasi produksi LCGC dan membahas isu ini bersama para produsen LCGC (Inilah.com, 2014b).





## Briefing

### Subsidi Energi

## Prospek Masa Depan: Update dan Estimasi 2014

Pada tanggal 18 Maret lalu, Jim Brumby, Manajer Sektor dan Ekonom Utama program ekonomi Indonesia Bank Dunia mengumumkan penerbitan Indonesia Economic Quarterly Maret 2014 oleh Bank Dunia, yang memperkirakan bahwa Indonesia akan melampaui defisit anggaran yang direncanakan sebesar 1,69 persen GDP. Bank Dunia memproyeksikan bahwa defisit anggaran akan mencapai 2,6 persen GDP. Dari sekian banyak isu yang ada, Brumby menekankan peran subsidi energi Indonesia dan menjabarkan dua skenario kenaikan harga bahan bakar di Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan harga sebesar Rp. 2.000 (US\$ 0,18) per liter untuk bensin dan Rp. 1.000 (US\$ 0,09) per liter untuk diesel otomotif. Hal tersebut akan mengurangi belanja subsidi sebesar Rp. 45,2 triliun (US\$ 3,1 miliar) dan mengurangi defisit anggaran hingga 2,1 persen GDP. Skenario kedua adalah meningkatkan harga bahan bakar sebesar setengahnya. Skenario ini akan mengurangi belanja subsidi sebesar Rp. 68 triliun (US\$ 6,1 miliar) dan mengurangi defisit anggaran sebesar 1,9 persen GDP (Merdeka, 2014b; Antara News, 2014b).

Menanggapi analisis ini, Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan bahwa kemungkinan terlampauinya alokasi subsidi bahan bakar masih membayangi karena masih terus berlangsungnya depresiasi rupiah terhadap US dollar. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan menyambut baik masukan dari lembaga-lembaga keuangan internasional, dan akan menggunakan estimasi dan saran dari lembaga-lembaga tersebut sebagai bahan evaluasi di Kementerian (Vivanews, 2014b).

Sebelumnya pada Februari 2014, Chatib Basri, Menteri Keuangan, yang menjabat sejak Mei 2014, mengklarifikasi posisi pemerintah tentang kemungkinan rasionalisasi harga bahan bakar pada 2014. Menurut pernyataannya, pemerintah belum berencana menyesuaikan harga bahan bakar cair tahun ini, namun akan terus mempromosikan program konversi dari bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi (Tempo, 2014d). Basri mengungkapkan kembali pandangannya bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan mengurangi subsidi, karena subsidi selama ini memakan proporsi besar dalam belanja pemerintah. Satu hari sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, juga mengutarakan pandangan serupa (Antara, 2014c).

## Siapa yang Paling Banyak Memakai Bahan Bakar Bersubsidi? Jawa Barat, Timur dan Tengah pada 2013

Pada bulan Maret ini, PT Pertamina menerbitkan update yang menunjukkan lima daerah utama yang paling banyak mengonsumsi Premium (bersubsidi) di Indonesia pada 2013.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan konsumsi sebesar 5,11 juta kiloliter, disusul oleh Jawa Timur (4,26 juta kiloliter), Jawa Tengah (3,30 juta kiloliter), DKI Jakarta (2,21 juta kiloliter) dan Sumatera Utara (1,71 juta kiloliter). Estimasi konsumsi bahan bakar bersubsidi secara keseluruhan pada 2013 adalah 29,2 juta kiloliter, yang sedikit lebih rendah dibandingkan kuota volume yang ditetapkan pada APBN Revisi 2013 yang





## Briefing

### Subsidi Energi

sebesar 30,7 juta kiloliter (Detik, 2014g). Ini berarti kelima daerah tersebut secara bersama-sama mengonsumsi lebih dari 55% bensin Premium pada 2013.

Laporan sebelumnya yang disusun oleh Global Subsidies Initiatives (GSI) IISD, yang didasarkan pada data BPH Migas, menunjukkan bahwa distribusi konsumsi bahan bakar subsidi ini sangat wajar, mengingat pengguna terbesar subsidi bahan bakar terkonsentrasi pada pusat-pusat ekonomi di Indonesia, khususnya wilayah Jawa-Bali (IISD, GSI, dan IESR, 2012).

Sejak 28 Februari 2014, PT Pertamina telah mendistribusikan 7,26 juta kiloliter bahan bakar bersubsidi, menurut Ali Mundakir, Wakil Presiden Bidang Komunikasi PT Pertamina. Ini termasuk 4,60 juta kiloliter bensin Premium, 2,48 juta kiloliter Solar dan 0,17 juta kiloliter minyak tanah. Ia menambahkan bahwa cadangan bahan bakar PT Pertamina cukup untuk pasokan bensin dan solar selama 19 hari, LPG selama 17 hari dan minyak tanah selama 59 hari (Kementrian ESDM, 2014a).

### **Subsidi Bahan Bakar untuk 170 Rute Penerbangan Perintis**

Pada tanggal 12 Maret, Direktur Jenderal Penerbangan Sipil, Herry Bakti Gumay, menjelaskan bahwa Kementerian Transportasi telah membuka tender untuk 170 rute penerbangan di 22 provinsi yang melayani daerah terpencil atau bandara kecil di Indonesia. Rute-rute yang dikenal sebagai rute penerbangan perintis ini melayani daerah terpencil, bandara kecil, atau daerah yang dianggap memiliki kapasitas ekonomi rendah atau sulit dijangkau karena infrastruktur transportasi yang terbatas (Tempo, 2014c; Merdeka, 2014). Tiga jasa penerbangan telah diumumkan sebagai pemenang tender, yaitu Susi Air, Trigana dan Avia Star. Subsidi sebesar Rp. 350 miliar (US\$ 32 juta) telah dialokasikan untuk program ini per wilayah pada 2014. Pada 2013, subsidi ini adalah sebesar Rp. 280 miliar (US\$ 250 juta) per wilayah (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014).

Subsidi untuk rute penerbangan perintis dimaksudkan untuk mengurangi biaya tiket pesawat dan mencakup komponen subsidi bahan bakar. Menurut Musdalifa Muslima, Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Komersial Tak Berjadwal, pemerintah akan mengompensasi dua pertiga biaya bahan bakar untuk tiga perjalanan pertama dari masing-masing rute. Perjalanan keempat dan selanjutnya tidak akan menerima subsidi lagi, guna mendorong kompetisi yang adil antara para penyedia jasa angkutan udara (Detik, 2014h).

Menurut sejumlah proposal tender, subsidi untuk program penerbangan perintis Indonesia ditransfer sebagai bagian dari Daftar Isian Pelaksanaan Program (DIPA) untuk bandara tertentu yang menerapkan program ini. Hal ini membuatnya berbeda dari mekanisme umum subsidi bahan bakar untuk angkutan darat, yang dibayarkan kepada PT Pertamina. Sumber lain juga menunjukkan bahwa subsidi ini tidak hanya diterapkan pada harga bahan bakar itu sendiri, namun juga pada kegiatan pemasokan bahan bakar yang lebih luas, seperti penyediaan kontainer bahan bakar dan transportasi bahan bakar (Kementrian Transportasi, 2014a; Kementrian Transportasi, 2014b).

Secara umum, sektor transportasi udara komersial tidak lagi menerima subsidi bahan bakar. Subsidi bahan bakar untuk industri penerbangan adalah jenis subsidi bahan bakar pertama yang dihapuskan oleh Indonesia setelah





# Briefing

## Subsidi Energi

Krisis Keuangan Asia (Kementrian ESDM, n.d.; Legowo, 2012).

### **Revisi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar untuk Sektor Perikanan**

Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, menyatakan pada 18 Februari bahwa perahu-perahu nelayan dengan gross tonase hingga 60 gross ton (GT) akan terus menerima subsidi solar (Tempo, 2014c). Menurut Sharif Cicip Sutardjo, Indonesia masih mampu menyediakan subsidi solar bagi nelayan, namun dibutuhkan dukungan pemerintah untuk merevitalisasi armada penangkap ikan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden No. 15/2011 (Antara News, 2014d).

Sebelumnya pada 2012, Keppres No. 15/2012 menetapkan bahwa hanya dua kelompok konsumen dalam sektor perikanan yang boleh menikmati subsidi solar, yaitu kapal penangkap ikan dengan GT di bawah 30 GT dan usaha budidaya perikanan kecil. Pada 15 Januari 2014, BPH Migas sebagai regulator hilir migas Indonesia mulai menerapkan instruksi ini dengan menerbitkan Surat Edaran BPH Migas No. 29/07/Ka.BPH/2014 tentang larangan distribusi bahan bakar bersubsidi untuk kapal di atas 30 giga ton. Instruksi ini ditujukan pada PT Pertamina, PT AKR Corporindo, dan PT Surya Parna Niaga sebagai distributor bahan bakar bersubsidi di Indonesia (Okezone, 2014c). Andy Noorsaman Sommeng, kepala BPH Migas, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan asumsi tentang kapasitas keuangan operator kapal penangkap ikan besar untuk membayar harga bahan bakar secara penuh (Detik, 2014i).

Penolakan terhadap keputusan BPH Migas ini segera datang dari berbagai kelompok. Pada 5 Februari 2014, ribuan nelayan menggelar demonstrasi di depan istana presiden di Jakarta (RMOL, 2014). Rieke Diah Pitaloka, politisi PDI-P, yang merupakan partai oposisi terbesar, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi merugikan nelayan karena operasi kapal penangkap ikan besar mengharuskan adanya pengaturan pendanaan bersama antara nelayan kecil dengan pemilik kapal (JPNN, 2014). Milton Pakpahan, anggota DPR dari Partai Demokrat, juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, dan menyatakan bahwa DPR belum diinformasikan mengenai kebijakan ini (Okezone, 2014d).

Menanggapi kritik di atas, Yugi Prayanto, Wakil Ketua KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 10.000 kapal penangkap ikan di atas 30 gross ton yang tidak mampu beroperasi karena tidak mampu membeli solar. Ia menambahkan bahwa situasi tersebut dapat menyebabkan sekitar 500.000 nelayan dan kru kapal kehilangan pekerjaan mereka (Sindonews, 2014b).

Dalam protes selanjutnya pada 17 Februari 2014, terjadi bentrokan antara nelayan yang berdemonstrasi dengan polisi di dekat pengilangan PT Pertamina di Balongan, Jawa Barat (Pikiran Rakyat, 2014). Setelah bertemu dengan Kemenko Perekonomian, Kementrian Perikanan, dan Kementrian ESDM, pemerintah menjawab dengan menginstruksikan BPH Migas untuk merevisi kebijakan tersebut. Ini merupakan salah satu revisi lain kebijakan subsidi bahan bakar hilir Indonesia, setelah keputusan Presiden pada Januari 2014 untuk mencabut keputusan PT Pertamina meningkatkan harga LPG tabung 12 kg.

Bahan bakar subsidi merk "Solar" dijual di harga RP. 5.500 (US\$ 0,50) per liter, sementara harga non-subsidinya berharga Rp. 13.500 (US\$ 1,22) per liter (Detik, 2014j). Menurut Statistik Nasional Indonesia, industri perikanan





# Briefing

## Subsidi Energi

Indonesia mempekerjakan 808.775 kapal penangkap ikan (data 2012), dan menjadi sumber pendapatan bagi sekitar 920.000 keluarga (data dari 2011) (Statistik Nasional, n.d.).

### **PLN Menyatakan Kerugian, Penyesuaian Tarif Listrik Terus Berlangsung pada 2014**

Pada bulan Februari lalu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertanggung jawab atas distribusi listrik menerbitkan report yang belum diaudit yang menunjukkan kerugian bersih 2013 senilai Rp. 30,9 triliun (US\$ 2,8 miliar). Pendapatan operasional PLN pada 2013 mencapai Rp. 258 triliun (US\$ 23,2 miliar), sementara biaya operasionalnya mencapai Rp. 223 triliun (US\$ 20,1 miliar). Meskipun mencatat laba operasional, depresiasi rupiah menyebabkan neraca negatif pada paruh kedua 2013. Sebanyak 20 persen hutang PLN menggunakan mata uang asing, sehingga nilai hutang tersebut dalam rupiah meningkat (Liputan6, 2014; Tempo, 2014a). Sebagai perbandingan, pada 2012 PLN mencatat laba bersih sebesar Rp. 3,2 triliun (US\$ 0,3 miliar) (Investasi Indonesia, 2014).

Pada 2013, PLN menjual 188,1 TWh listrik, dan sedikit meleset dari target distribusinya yang sebesar 189,7 TWh. Biaya Pokok Produksi (Listrik) diperkirakan sebesar Rp. 1.338 (US\$ 0,12) per kWh dan biaya non-bahan bakar sebesar Rp. 211 (US\$ 0,02) per kWh (Antara News, 2014b). Nur Pamudji, Dirut PLN, melaporkan bahwa pada 2013, tingkat elektrifikasi mencapai 80 persen populasi Indonesia. Pada 2014, PLN mengharapkan adanya kenaikan tingkat elektrifikasi sebesar 1,4 persen (Tempo, 2014b).

Kepmen ESDM No. 30/2012 memberikan peta jalan penyesuaian tarif, dan berdasarkan Kepmen tersebut tarif listrik di Indonesia disesuaikan bertahap setiap tiga bulan sepanjang 2013. Regulasi ini mengelompokkan konsumen listrik menjadi beberapa kelas. Hasil dari penyesuaian tarif pada 2013 ini, harga eceran untuk tiga kelas konsumen (yaitu perumahan besar R3, bisnis menengah B2, dan fasilitas pemerintah P1) mencapai tingkat yang diperkirakan cukup untuk menutup biaya penuh operasional dan pemeliharaan sistem listrik, yaitu sekitar Rp. 1.350 - 1.380 (US\$ 0,12) per kWh. Untuk kelas lainnya, tarif tetap di bawah estimasi biaya produksi listrik PLN, belum termasuk penyesuaian ke atas (upward adjustment).

Pada 2014, Pemerintah Indonesia bersama DPR mencapai kesepakatan untuk meneruskan penerapan skema untuk mencabut subsidi listrik secara bertahap, khususnya untuk industri skala menengah dan besar (I3 dan I4), perumahan besar (R3), bisnis skala menengah dan besar (B2 dan B3), serta fasilitas pemerintah (P1). Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan bahwa konsumen rumah tangga dengan koneksi di bawah 900VA akan terus menerima subsidi sebesar hingga Rp. 47 triliun (US\$ 4,2 miliar) pada 2014. Total alokasi subsidi listrik untuk seluruh kelas yang disubsidi untuk tahun fiskal 2014 adalah Rp. 89,77 triliun (US\$ 8,1 miliar), di mana Rp. 71,36 triliun (US\$ 6,4 triliun) merupakan jumlah subsidi dan Rp. 10,41 (US\$ 0,9 miliar) adalah alokasi cadangan risiko (Kementerian ESDM 2014).

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung, menjelaskan bahwa pemerintah mengharapkan dampak inflasi moderat dari penyesuaian tarif listrik dan tidak akan menyesuaikan target inflasi tahunan yang ditetapkan sebesar 4,5 persen untuk 2014 (Sindonews, 2014a).







# Briefing

## Subsidi Energi

Menurut Agung, kenaikan harga LPG tabung 12kg pada Januari 2014 diperkirakan akan menjadi faktor tunggal terkuat yang menyebabkan kenaikan inflasi, sebesar 0,17 persen dari target inflasi keseluruhan yang diperkirakan mencapai 4,5 persen pada 2014. Penyesuaian tarif listrik diharapkan akan dimulai pada bulan Mei 2014 (Okezone, 2014d).

### Referensi

Antara. (2014a, May 21). Jero nyatakan tak ada rencana kenaikan harga BBM. Retrieved from: <http://www.antaranews.com/berita/435318/jero-nyatakan-tak-ada-rencana-kenaikan-harga-bbm>

Antara News. (2014b, February 10). PLN rugi Rp30,9 triliun pada 2013. Retrieved from: <http://www.antaranews.com/berita/418265/pln-rugi-rp309-triliun-pada-2013>

Antara News. (2014c, February 26). Gubernur BI imbau pemerintah kurangi subsidi BBM. Retrieved from: <http://www.antaranews.com/berita/421209/gubernur-bi-imbau-pemerintah-kurangi-subsidi-bbm>

Antara News. (2014d, February 18). Kuota subsidi BBM untuk nelayan masih cukup. Retrieved from: <http://www.antaranews.com/berita/419771/kuota-subsidi-bbm-untuk-nelayan-masih-cukup>

Antara News. (2014e, March 18). Bank Dunia ingatkan reformasi belanja subsidi energi. Retrieved from: <http://www.antaranews.com/berita/424791/bank-dunia-ingatkan-reformasi-belanja-subsidi-energi>

Bank of Indonesia. (n.d.). Foreign Exchange Rates. Retrieved from: <http://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx>

Berita Daerah. (2014, May 26). Realisasi Penyaluran BBM Subsidi Hingga April 2014 Capai 31,7 Persen. Retrieved from: <http://beritadaerah.com/2014/05/26/realisasi-penyaluran-bbm-subsidi-hingga-april-2014-capai-317-persen/>

Bisnis.com. (2014a, May 21). Cawapres Jusuf Kalla Sarankan Subsidi BBM Dicabut. Retrieved from: <http://news.bisnis.com/read/20140521/355/229925/cawapres-jusuf-kalla-sarankan-subsidi-bbm-dicabut>

Bisnis.com. (2014b, May 21). Jokowi-JK Janji Subsidi BBM Turun Rp 60 Triliun. Retrieved from: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/21/1418596/Jokowi-JK.Janji.Subsidi.BBM.Turun.Rp.60.Triliun>

Detik.com. (2014a, May 21). Prabowo dan Jokowi Mau Kurangi Subsidi BBM, Tantangannya Berat. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/05/21/112528/2588066/1034/prabowo-dan-jokowi-mau-kurangi-subsidi-bbm-tantangannya-berat>

Detik.com. (2014b, April 30). Ide Jokowi: Subsidi BBM Harus Hilang dalam 4 Tahun. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/04/30/102721/2569495/1034/ide-jokowi-subsidi-bbm-harus-hilang-dalam-4-tahun>

Detik.com. (2014c, May 26). Subsidi BBM Bakal Tembus Rp 285 T Tahun Ini. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/05/26/151055/2592550/1034/subsidi-bbm-bakal-tembus-rp-285-t-tahun-ini>

Detik.com. (2014d, April 14). Tahun Ini, Anggaran Subsidi BBM Bisa Bengkak Sampai Rp 240 T. Retrieved from:





# Briefing

## Subsidi Energi

<http://finance.detik.com/read/2014/04/30/172238/2570320/1034/tahun-ini-anggaran-subsidi-bbm-bisa-bengkak-sampai-rp-240-t>

Detik.com (2014e, May 4). Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi di DKI Baru Terpasang 7%. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/05/04/175421/2572732/1034/pemasangan-alat-pengendali-bbm-subsidi-di-dki-baru-terpasang-7>

Detik.com (2014f, April 4). Bulan Ini Waktu Paling Tepat Naikkan Harga BBM. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/04/04/141527/2545603/1034/bulan-ini-waktu-paling-tepat-naikkan-harga-bbm>

Detik.com (2014g, March 10). 5 Daerah Ini Paling Banyak 'Minum' BBM Premium Tahun Lalu. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/03/10/075936/2520467/1034/5-daerah-ini-paling-banyak-minum-bbm-premium-tahun-lalu>

Detik.com (2014h, March 11). Tahun Ini Kemenhub Tambah 170 Rute Penerbangan Perintis. Retrieved from: <http://news.detik.com/read/2014/03/11/131552/2522117/10/tahun-ini-kemenhub-tambah-170-rute-penerbangan-perintis>

Detik.com. (2014i, February 5). Ini Alasan Kapal Ukuran 30 GT Haram 'Minum' BBM Subsidi. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/02/05/172905/2488365/1034/ini-alasan-kapal-ukuran-30-gt-haram-minum-bbm-subsidi>

Detik.com. (2014j, April 1). BBM Shell Naik Rp 850 per Liter di Awal Tahun. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/01/04/132922/2458240/1034/bbm-shell-naik-rp-850-per-liter-di-awal-tahun>

Detik.com (2013k). Kenaikan Harga BBM Diumumkan Pukul 22.00 WIB di Kantor Hatta Rajasa. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2013/06/21/143538/2280274/1034/kenaikan-harga-bbm-diumumkan-pukul-2200-wib-di-kantor-hatta-rajasa>

Detik.com. (2014l, May 31). Ini Alasan Prabowo-Hatta Tak Bisa Hapus Subsidi BBM. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/05/31/124952/2596100/1034/ini-alasan-prabowo-hatta-tak-bisa-hapus-subsidi-bbm>

Gerindra. (n.d.). Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya. Retrieved from: <http://partaigerindra.or.id/uploads/Manifesto-Perjuangan-Partai-Gerindra.pdf>

Indonesia Investments. (2014, February 12). Financial Victims of Sharp Rupiah Depreciation: Garuda and PLN. Retrieved from: <http://www.indonesia-investments.com/finance/financial-columns/financial-victims-of-sharp-rupiah-depreciation-garuda-indonesia-and-pln/item1635>

Inilah.com. (2014a, March 15). BKF Usulkan Kenaikan BBM Subsidi Maksimal Rp1.000. Retrieved from: <http://web.inilah.com/read/detail/1968073/bkf-usulkan-kenaikan-bbm-subsidi-maksimal-rp1000#.U4MqUX-xOho>

Inilah.com. (2014b, March 26). Menperin Minta Waktu Periksa BBM Mobil Murah. Retrieved from: <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2086358/menperin-minta-waktu-periksa-bbm-mobil-murah#.UzqwW8f42Fg>





# Briefing

## Subsidi Energi

International Institute for Sustainable Development (IISD), Global Subsidies Initiative (GSI), and the Institute for Essential Service Reform (IESR). (2012). A Citizen's Guide to Energy Subsidies in Indonesia. 2012 Update. Geneva: IISD.

International Institute for Sustainable Development (IISD). (2013). Indonesia Energy Subsidy Briefing. October 2013. Geneva: IISD.

JPNN. (2014, February 5). Rieke: Pemerintahan SBY Cekik Nelayan. Retrieved from: <http://www.jpnn.com/read/2014/02/05/215026/Rieke:-Pemerintahan-SBY-Cekik-Nelayan->

Legowo, E. (2012). Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi. A presentation in Workshop IIEE, GSI & IISD on the Control Management of Subsidized Fuel: Implementation Preparation and Mitigation of Negative Impact. Jakarta, 15 March 2012.

Liputan6.com (2014a, May 22). BBM Subsidi Tak Dijual saat Libur, Pengusaha: Apa Kabar RFID? Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2053279/bbm-subsidi-tak-dijual-saat-libur-pengusaha-apa-kabar-rfid>

Liputan6. (2014b, February 10). PLN Rugi Rp 30 Triliun pada 2013. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/823125/pln-rugi-rp-30-triliun-pada-2013>

Medan Bisnis. (2014, March 25). Alasan Jero Wacik Tak Bisa Larang Mobil LCGC Pakai Premium. Retrieved from: [http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/03/25/86584/alasan\\_jero\\_wacik\\_tak\\_bisa\\_larang\\_mobil\\_lcgc\\_pakai\\_premium/#.Uzqtz8f42Fg](http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/03/25/86584/alasan_jero_wacik_tak_bisa_larang_mobil_lcgc_pakai_premium/#.Uzqtz8f42Fg)

Merdeka. (2014, March 13). Lelang 170 rute penerbangan perintis, Kemenhub siapkan Rp 300 M. Retrieved from: <http://m.merdeka.com/uang/lelang-170-rute-penerbangan-perintis-kemenhub-siapkan-rp-300-m.html>

Merdeka. (2014b, March 18). Bank Dunia desak pemerintah naikan harga BBM subsidi saat APBNP. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/uang/bank-dunia-desak-pemerintah-naikkan-harga-bbm-subsidi-saat-apbnp.html>

Ministry of Energy and Mineral Resources. (2014a, March 21). Penyaluran BBM Subsidi 2014 Capai 7,26 Juta KL. Retrieved from: <http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasana/detail/3558/Penyaluran-BBM-Subsidi-2014-Capai-7,26-Juta-KL>

Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). (2014b, January 22). Secara Bertahap, Subsidi Listrik Gol. I3 dan I4 akan Dihapus. Retrieved from: <http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/6669-secara-bertahap-subsidi-listrik-gol-i3-dan-i4-akan-dihapus.html>

Ministry of Energy and Mineral Resources. (n.d.). Perkembangan Harga BBM 1965 - 2000.

Ministry of Finance. (2014, January 30). Menkeu: APBN-P 2014 Tunggu Evaluasi Asumsi Makro. Retrieved from: <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-apbn-p-2014-tunggu-evaluasi-asumsi-makro>

Ministry of Transportation. (2014a). PENGUMUMAN LELANG ULANG PASCAKUALIFIKASI Nomor : PL.102/11/BBM/III/BG-2014. Retrieved from: <http://dephub.go.id/files/media/file/lelang/hubud/2014/PENGUMUMAN%20SUBSIDI%20BBM%20%28LELANG%20ULANG%29.pdf>





# Briefing

## Subsidi Energi

Ministry of Transportation. (2014b). SUBSIDI ANGKUTAN BBM PENERBANGAN PERINTIS VOLUME 650 DRUM. Retrieved from: <http://lpse.dephub.go.id/eproc/lelang/view/11084114>

National Statistics (BPS). Perikanan. Retrieved from: [http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=3&tabel=1&id\\_subyek=56](http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=3&tabel=1&id_subyek=56)

Okezone. (2014a, May 21). Alasan Pemerintah Ajukan Revisi Lifting Minyak. Retrieved from: <http://economy.okezone.com/read/2014/05/21/19/988119/alasan-pemerintah-ajukan-revisi-lifting-minyak>

Okezone. (2014b, May 21). Wacana Kenaikan Harga BBM, Ini Tanggapan Menteri ESDM. Retrieved from: <http://economy.okezone.com/read/2014/05/21/19/988030/wacana-kenaikan-harga-bbm-ini-tanggapan-menteri-esdm>

Okezone. (2014c, DPR Minta Penghentian Subsidi BBM Bagi Kapal Nelayan Dikaji. Retrieved from: <http://economy.okezone.com/read/2014/02/05/19/936547/dpr-minta-penghentian-subsidi-bbm-bagi-kapal-nelayan-dikaji>

Okezone. (2014d, February 7). Kenaikan TDL Ditunda, Pemerintah Boros Rp3 Triliun. Retrieved from: <http://economy.okezone.com/read/2014/02/07/20/937569/kenaikan-tdl-ditunda-pemerintah-boros-rp3-triliun>

Pikiran Rakyat. (2014, February 18). Aksi Nelayan Indramayu Berakhir Ricuh. Retrieved from: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/270430>

Portal KBR (2014, May 21). Kebijakan Energi Prabowo: Kurangi Subsidi BBM dengan Meningkatkan Pendapatan Rakyat. Retrieved from: [http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3253777\\_5534.html](http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3253777_5534.html)

RMOL Sumsel. (2014, April 5). Kenaikan Harga BBM Tergantung pada Inflasi. Retrieved from: <http://www.rmolsumsel.com/read/2014/04/05/4339/Kenaikan-Harga-BBM-Tergantung-pada-Inflasi->

RMOL.CO. (2014, February 6). Ribuan Nelayan Pantura Geruduk Istana Negara. Retrieved from: <http://www.rmol.co/read/2014/02/06/142794/Ribuan-Nelayan-Pantura-Geruduk-Istana-Negara->

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014, March 13). 3 Maskapai Menang Tender 170 Rute Perintis. Retrieved from: <http://setkab.go.id/nusantara-12415-3-maskapai-menang-tender-170-rute-perintis.html>

Sindonews. (2014a, February 24). BI: Kenaikan TDL tidak berdampak besar pada inflasi. Retrieved from: <http://ekbis.sindonews.com/read/2014/02/24/33/838606/bi-kenaikan-tdl-tidak-berdampak-besar-pada-inflasi>

Sindonews. (2014b, February 5). Kadin minta kapal besar dapat subsidi BBM. Retrieved from: <http://ekbis.sindonews.com/read/2014/02/05/34/833068/kadin-minta-kapal-besar-dapat-subsidi-bbm>

Tempo. (2014a, February 10). Mengapa PLN Rugi hingga Rp 30,9 Triliun?. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/10/090552869/Mengapa-PLN-Rugi-hingga-Rp-309-Triliun>

Tempo. (2014b, February 10). Begini Strategi PLN Menggenjot Rasio Elektrifikasi. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/10/090552911/Begini-Strategi-PLN-Menggenjot-Rasio-Elektrifikasi>





# Briefing

## Subsidi Energi

Tempo. (2014c, February 18). Sistem Subsidi BBM Nelayan Diubah. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/18/092555429/Sistem-Subsidi-BBM-Nelayan-Diubah>

Tempo. (2014d, March 12). Layani Perintis, Pemerintah Kucurkan Rp 300 Miliar. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/12/090561695/Layani-Perintis-Pemerintah-Kucurkan-Rp-300-Miliar>

Tempo. (2014e, February 27). Chatib: Tak Ada Rencana Kenaikan Harga BBM. Retrieved from: [http://id.berita.yahoo.com/chatib-tak-ada-rencana-kenaikan-harga-bbm-130830460--finance.html?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=twitter](http://id.berita.yahoo.com/chatib-tak-ada-rencana-kenaikan-harga-bbm-130830460--finance.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

Tempo. (2014f, March 23). Subsidi BBM Tekor, Mobil Murah Dievaluasi. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/23/123564591/Subsidi-BBM-Tekor-Mobil-Murah-Dievaluasi>

Vivanews. (2014a, May 22). Perbandingan Visi Prabowo dan Jokowi di Bidang Migas. Retrieved from: <http://politik.news.viva.co.id/news/read/506397-perbandingan-visi-prabowo-dan-jokowi-di-bidang-migas>

Vivanews. (2014b, March 21). Bank Dunia Prediksi Subsidi BBM Tahun Ini Melonjak Rp56 Triliun. Retrieved from: <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/490544-bank-dunia-prediksi-subsidi-bbm-tahun-ini-melonjak-rp56-triliun>





# Briefing

## Subsidi Energi

Published by the International Institute for Sustainable Development.

### **International Institute for Sustainable Development**

Head Office

161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4

Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: [www.iisd.org](http://www.iisd.org)

### **About IISD**

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

### **About GSI**

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

### **International Institute for Sustainable Development**

Global Subsidies Initiative

International Environment House 2

9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 917-8373 | Fax: +41 22 917-8054

